

**TESIS**

**PENGGUNAAN HAK CUTI BAGI NOTARIS BERDASARKAN KEADAAN  
TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI  
SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*



Oleh:

**M. IRDHAN DWIKO ALENDINA**  
**NIM: 2220122016**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

## **Penggunaan Hak Cuti Bagi Notaris Berdasarkan Keadaan Tertentu Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Di Sumatera Barat**

M. Irdhan Dwiko Alendina, 2220122016, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024.

### **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang dan hak-haknya dijamin secara konstitusional. Cuti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris untuk memperoleh hak cuti adalah telah menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Sumatera Barat pada Tahun 2019, salah satu Notaris yang berkedudukan di Batusangkar mengajukan izin cuti sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dengan alasan berdasarkan keadaan tertentu, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti kepada Notaris tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pertama, mekanisme pengajuan cuti yang diterapkan pada Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, sebagaimana dalam hal ini oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu 1) mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai jangka waktu izin cuti, 2) penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan tertentu sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.

**Kata Kunci:** *Notaris, Hak Cuti Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris*

## **The Use of Leave Rights for Notaries Based on Certain Circumstances According to the Notary Position Law in West Sumatra**

M. Irdhan Dwiko Alendina, 2220122016, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024.

### **ABSTRACT**

Notaries are public officials who have the authority to make authentic deeds and other authorities regulated in the Law and their rights are constitutionally guaranteed. Leave is one of the rights owned by a Notary. One of the requirements that must be met by a Notary to obtain leave is to have served a term of office for 2 (two) years in accordance with Article 25 of the Notary Position Law. In West Sumatra in 2019, one of the Notaries domiciled in Batusangkar applied for a leave permit before reaching the term of office of 2 (two) years on the grounds based on certain circumstances, in this case the Notary Supervisory Council granted a leave permit to the Notary. The problems in this research are: 1) How is the mechanism for applying for leave for Notary based on certain circumstances before reaching the term of office of 2 (two) years, 2) How are the considerations of the Notary Supervisory Council in granting leave to Notaries based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office. The research method used is empirical juridical legal research with data collection techniques using interviews and document studies. The results of the study found that first, the mechanism for applying for leave applied to Notaries based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office, as in this case by the Notary Supervisory Panel, namely 1) submitting a notification or reporting to the Notary Supervisory Panel, regarding the period of leave permission, 2) acceptance of leave permission by the Notary Supervisory Panel. Second, the consideration of the Notary Supervisory Panel in granting leave to a Notary based on certain circumstances before reaching the 2 (two) year term of office, in this case to one Notary who applied for leave to perform the hajj pilgrimage. The consideration of the Notary Supervisory Panel is that the departure for the Hajj pilgrimage is not determined by the Notary himself but by the government through the Ministry of Religious Affairs. Related to the implementation of the Hajj pilgrimage, the Notary Supervisory Council also provides other considerations because the application for leave must be accepted so that the rights possessed by the Notary are fulfilled in the context of worship.

**Keywords:** *Notary, Notary Leave Rights, Notary Position Law*